

Kota Sukabumi Jalankan PTM 50 Persen

SUKABUMI (IM) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen dari kapasitas sekolah untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Awalnya kami menetapkan PTM tetap dilaksanakan 100 persen, tetapi pada Jumat, (4/2) kami mendapatkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset RI terkait PTM, dan langsung kami tanggap dengan membuat Surat Edaran tentang Penyesuaian PTM Terbatas," kata Kepala Disdikbud Kota Sukabumi Hasan Asari di Sukabumi, seperti dikutip dari Antara, Minggu (6/2).

SE Nomor PK.02.05/046/Sekretariat /II/ 2022 tentang Penyesuaian PTM terbatas ini dikeluarkan berdasarkan SE Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Selain itu, mengacu Surat Edaran Wali Kota Sukabumi Nomor HK.02.01/104/Huk/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dalam Penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi, diperlukan penyesuaian PTMT dengan kondisi saat ini.

Menurut Hasan, pihaknya telah menyebarkan SE tersebut kepada seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan

kesetaraan. Setiap sekolah wajib melaksanakan terhitung mulai Senin, 7 Februari 2022, PTM terbatas dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas, kemudian satuan pendidikan memberikan pilihan kepada orang tua peserta didik untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Satuan pendidikan harus membuat surat edaran kepada orangtua peserta didik untuk memastikan setiap peserta didik telah sarapan pagi, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan serta memastikan pelajar yang terindikasi sakit tidak masuk sekolah. Selanjutnya, satuan pendidikan memastikan ventilasi sirkulasi udara ruang kelas berfungsi dengan baik, tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, upacara bendera dan memfungsikan satgas masing-masing untuk mengantisipasi kerumunan saat pulang sekolah.

Mengimbau orang tua peserta didik untuk menghindari kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan peserta didik.

"Kebijakan ini bersifat evaluasi dan akan dilakukan pemberitahuan berikutnya apabila ada perubahan status PPKM serta memperhatikan kondisi lainnya," tambahnya.

Hasan meminta kepada seluruh orang tua murid untuk memantau aktivitas anaknya yang mengikuti PTM terbatas di sekolah mulai dari berangkat hingga pulang sekolah, sehingga tidak keluyuran kemana-mana, serta memastikan anak yang ikut PTM dalam kondisi sehat. ● pra

Depok Akan Bangun Alun-alun di Wilayah Barat

DEPOK (IM) - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyatakan akan membangun alun-alun di wilayah barat yang letaknya dekat Situ Tujuh Muara di Kecamatan Bojongsari. "Insya Allah akan dibangun alun-alun wilayah barat di lahan seluas 2,2 hektar," kata Imam dalam keterangannya, Sabtu (5/2).

Imam mengatakan tahap pembangunannya akan dilakukan pada tahun 2023. Sebab, tahun ini pihaknya masih menyiapkan berbagai hal, salah satunya Detail Engineering Design (DED). "Kami juga harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (B2WSCC) agar diizinkan membuat alun-alun di pinggir setu," katanya.

Lebih lanjut, kata Imam, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Agar dilakukan penunpan pada sisi setu tersebut. "Mohon donanya dari warga Depok sekalian, semoga rencana pembangunannya berjalan lancar dan tepat waktu," katanya.

Sebelumnya Pemkot Depok telah membangun alun-alun di kawasan Grand Depok City. Berbagai fasilitas yang ada di alun-alun Depok di antaranya greenhouse, lapangan futsal, lapangan basket, jalur sepeda BMX, outdoor gym, arena skateboard.

Lalu ada menara pandang, bike shelter, co-working space, seltzer bus, jembatan utama, kolam retensi dan dermaga, greenhouse and signage, taman lansia, taman anak-anak, gedung pendopo, galeri, dinding mural, taman sculpture dan amphitheater. ● yy



PELAKSANAAN PERINGATAN HARI PERS NASIONAL 2022 DI KENDARI

Pengunjung berfoto di maskot dan logo peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022 di areal MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (6/2). Rangkaian peringatan HPN akan berlangsung sejak tanggal 7 sampai 9 Februari 2022 di Kendari dan rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Dedi Mulyadi-Ade Ginanjar Dijagokan Pimpin Golkar Jabar

BANDUNG (IM) - Belasan Kader senior Golkar Jawa Barat menyambut langkah DPP Golkar yang akan melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Golkar Jabar. Saat ini kursi Ketua DPD Golkar Jabar diisi oleh Ace Hasan Syadzily sebagai pelaksana tugas atau Plt.

Perwakilan Kader Golkar Senior Jawa Barat Wawan Dioz mengatakan saat ini Golkar Jawa Barat kehilangan sosok pemimpin. Namun dengan adanya Musdalub ini diharapkan partai Golkar Jawa Barat kembali menggeliat.

"Sejak ditinggalkan Pak Ade Barkah, Partai Golkar Jabar hampir tidak ada pergerakan atau tertidur. Ini sangat memprihatinkan," ujar Wawan, kepada wartawan, Minggu (6/2).

Bento mengatakan pihaknya bersama kader senior Golkar Jabar lain berharap tidak intervensi dalam pemilihan ketua DPD Golkar Jabar dari pengurus DPP Golkar. "Tugas DPP hanya menggelar Musdalub saja. Jadi jangan ada calon titipan, biarkan musdalub nanti

berjalan demokratis sehingga bisa menghasilkan seorang pemimpin yang memang paham terhadap kondisi politik di Jawa Barat," kata Wawan.

Menurut Wawan hanya para kader Golkar di Jawa Barat yang tahu siapa sosok yang pantas memimpin Golkar Jabar. Apalagi lanjut Bento tahun ini tahapan pemilu sudah dimulai sehingga waktu semakin sempit. "Dengan segala hormat kepada pengurus DPP Golkar jika ingin menang pileg dan pilpres 2024, jangan intervensi Musdalub Jabar," tuturnya.

Bento menyebutkan nama Dedi Mulyadi dan Ade Ginanjar dinilai merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Golkar Jabar kedepannya. "Pak Dedi Mulyadi dan Ade Ginanjar paling realistis pada saat ini untuk memimpin Golkar Jabar sekaligus punya potensi besar untuk ikut kontestasi pilgub. Mereka sering turun lapangan dan apalagi hasil surveynya di luar dugaan masuk dalam bursa capres mendatang," kata Wawan. ● pur

8 Nusantara



IDN/ANTARA

BANJIR AKIBAT LUAPAN SUNGAI DI KABUPATEN PEKALONGAN

Banjir merendam Desa Kebangkerep, Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (6/2). Banjir yang merendam enam dukuh di Desa Kebangkerep dan tiga dukuh di Desa Purwodadi itu akibat curah hujan tinggi pada Sabtu (5/2) dan meluapnya Sungai Winong di sekitar desa tersebut.

Ridwan Kamil dan Tokoh Sunda Sepakat Pemekaran Wilayah Jadi Agenda Bersama

"Yang ingin lebih kami perjuangkan adalah pemekaran kota/kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah," kata Ridwan Kamil.

BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan tokoh Sunda menyepakati pemekaran kabupaten/kota di Jabar menjadi agenda bersama untuk mendapatkan keadilan fiskal berupa Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi dengan tokoh Sunda di Aula Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Kota

Bandung, Sabtu (5/2). "Yang ingin lebih kami perjuangkan adalah pemekaran kota/kabupaten di Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit, sehingga terjadi ketidakadilan fiskal dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah," kata Ridwan Kamil dikutip dari laman Pemprov Jabar.

Perjuangan tersebut juga mengemuka menyikapi sebagian elemen yang mengatas-

namakan Sunda, yang mengeluarkan Makloemat Sunda 2022 diprakarsai oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan. Elemen ini mengusulkan untuk menggabungkan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten menjadi Provinsi Sunda. Namun para sepeuh Sunda sepakat menolak berdirinya Provinsi Sunda. "Terkait deklarasi itu, para Inohong, juga ketua organisasi masyarakat tidak menyetujui penggabungan tiga Provinsi menjadi Provinsi Sunda," ucapnya.

Selain itu, para tokoh Sunda juga menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah bangsa. Ini menjawab isu deklarasi Negara Islam Indonesia (NII) yang terjadi di Kabupaten Garut.

"Kami sangat menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah, seperti ada deklarasi NII di Garut. Oleh karenanya kami mendukung upaya dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Polri untuk menangkap oknum-oknum yang merusak nama baik Islam dan kesundanan di tanah Jawa Barat," tuturnya.

Ridwan juga menyampaikan, para tokoh Sunda sepakat untuk membuat satu forum komunikasi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesundanan cukup keluar dari satu pintu. "Seperti kejadian baru-baru ini dari salah seorang anggota DPR terkait dengan kesundanan, gairah dari tokoh-tokoh Sunda saat ini sedang semangat sekali untuk bersatu, menyamakan irama dan suara,

sehingga insya Allah, nanti akan lahir organisasi forum komunikasi supaya isu-isu kesundanan cukup keluar dari satu pintu," terangnya.

Langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaga kondusivitas di Jabar karena empat pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika harus dijunjung tinggi.

"Jadi sikap saya sebagai Gubernur, Provinsi Jawa Barat harus terus dijaga kondusivitasnya dari dinamika dan narasi-narasi disintegrasi terhadap kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama dari Tatar Sunda untuk menjunjung tinggi empat pilar, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya. ● yy

Bima Arya: Semangat Persaudaraan Harus Terus Dikuatkan

BOGOR (IM) - Para tokoh lintas agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor memperingati Hari Persahabatan Manusiawi Internasional di Paroki Santo Fransiskus Asisi Sukasari, Jalan Siliwangi, Bondongan, Kota Bogor, Jumat (4/2).

Dalam acara yang dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya ini, para tokoh lintas agama mengajak seluruh umat manusia untuk tetap menjaga persaudaraan, memperkuat iman dan saling memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam perbedaan.

Bima Arya dalam sambutannya mengatakan, persaudaraan yang terjaga dari masa ke masa di kota hujan ini bukan hadiah. "Ini adalah ikhtiar yang harus terus dikuatkan dari generasi ke generasi. Jangan sampai berhenti di sini. Jangan sampai terputus di generasi kita atau setelah kita," ungkap Bima Arya seperti dikutip dari laman Pemkot Bogor.

Menurutnya, membangun kota itu bukan hanya membangun fisik atau infrastruktur, tapi juga kultur. "Menata kota itu bukan hanya membangun infrastruktur tapi membangun kultur, membangun kebiasaan yang menghormati perbedaan. Kita jelaskan ke anak cucu kita bahwa berbeda itu biasa. Bagaimana kita meyakinkan lingkungan kita bahwa perbedaan itu keniscayaan. Bagaimana kita mengelola setiap perbedaan menjadi kekuatan itu adalah PR kita bersama," jelasnya.

Bima mencontohkan banyak negara yang peradabannya lebih maju, harus hancur karena konflik. "Sering kita lupa bahwa bangsa yang besar di dunia ini yang peradabannya maju, yang peradabannya kuat bisa hancur dalam hitungan hari karena manusianya, karena konflik yang terjadi. Mereka lupa kegagahan pembangunan fisik tidak diiringi dengan membangun manusia

karena kecolongan. Itulah yang terjadi di negara-negara eks Rusia, di Afrika dan lain sebagainya," kata Bima.

Hal-hal seperti itu, lanjutnya, bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia jika bangsa kita tidak memiliki semangat kebersamaan dalam keberagaman.

"Hari ini Indonesia diuji. Ada sisa-sisa residu dari kontestasi Pilgub hingga Pilpres. Mari kita potong konflik itu, mari kita gunting sisa-sisa ketidakpercayaan, kebencian, permusuhan itu cukup sampai saat ini. Apa yang kita lakukan hari ini sangat menentukan apa yang akan dialami generasi selanjutnya," terang pria yang juga menjabat Ketua APEKSI ini.

"Saya bersyukur sekali bersama Badan Sosial Lintas Agama (Basolia), FKUB, dengan semuanya menjaga itu. Tapi itu belum cukup. Kita harus lakukan itu secara siste-

matis. Karena kalau tidak, yang berbeda DNA ini yang akan melakukan itu secara sistematis juga. Kalau kita tidak memiliki strategi yang sistematis, maka persaudaraan, kebersamaan dalam keberagaman itu akan tergerus," tambahnya.

Bima Arya kemudian mengajak semua untuk berintrospeksi dan saling menguatkan persaudaraan diantara sesama manusia.

"Mari kita bermusabah, berkontemplasi untuk merevungi seberapa kuat persaudaraan kita ini. Apakah rasa bersaudara kita cukup kuat untuk menghadapi kontestasi politik nanti? Apakah persaudaraan ini cukup kuat ketika kita diterjang varian baru Covid-19 lagi misalnya? Apakah persaudaraan kita cukup kuat untuk membawa kita tetap bertahan di berbagai ujian? Modalitas kita luar biasa. Kita bangga begitu banyak cerita-cerita inspiratif

di setiap sudut kota tentang persaudaraan, tentang kebersamaan," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan bakti sosial ratunan paket sembako untuk warga yang disalurkan melalui masjid-masjid di sekitar Gereja Santo Fransiskus Asisi.

Uskup Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur, OFM, mengatakan, semangat Hari Persahabatan Manusiawi Internasional merupakan semangat toleransi untuk menumbuhkan rasa persaudaraan diantara umat manusia.

"Kami menyadari bahwa kita perlu berjalan bersama. Karena perjalanan bersama perlu ada semangat toleransi. Meneguhkan dan menguatkan perbedaan bukan hanya perbedaan agama tetapi perbedaan karakter, dan perbedaan fungsi kita, untuk Indonesia Maju dan Indonesia Kuat," tandasnya. ● yan

Jajaran ASN Pemkab Bogor Agar Melaksanakan Pencegahan Korupsi

BOGOR (IM) - Jajaran (Aparatur Sipil Negara) ASN di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor agar melaksanakan pencegahan korupsi.

Hal ini disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin, Jumat (4/2) saat koordinasi dan Monev Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi / Monitoring Center for Prevention (MCP), di Ruang Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong.

Hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah, Burhanudin, jajaran Kepala Dinas, Camat, dan Kepala RSUD. Dijelaskan, MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.

Hadir memberikan materi MCP yakni, Inspektur Khusus Tjten Kemendagri, Teguh Narutomo, Inspektur Wilayah II Tjten Kemendagri, Uok A. Damenta, dan Inspektur Wilayah IV Tjten Kemendagri, Arsan Latif.

Bupati Bogor, Ade Yasin menjelaskan, ini adalah upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Meski Kabupaten Bogor berkali-kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak lantas membuat kita selalu merasa baik-

baik saja, kita tetap berupaya untuk selalu menjadi lebih baik ke depan.

"Setiap tahun selalu ada perubahan dan perkembangan aturan dan kebijakan, oleh karenanya hari ini kita update kembali informasi dan pengetahuan kita mengenai program pencegahan korupsi, yang materinya akan disampaikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri," ujar Ade. Ade mengungkapkan, di tengah kondisi Covid-19 yang sedang meningkat,

Pemkab Bogor tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dan juga program-program. Bahkan di masa pandemi ini, pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Di tahun 2021 kondisi keuangan kita stabil, APBD kita tidak terganggu meskipun ada refocusing untuk penanganan Covid-19.

"Kita sedang kejar pembangunan infrastruktur di desa, Alhamdulillah kini sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Kita lihat kondisi desa masih butuh pembangunan infrastruktur, dan kita masih upayakan untuk penanganan Covid-19.

Ade menyebutkan, khusus Inspektur Kabupaten Bogor, perlu meningkatkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengedepankan langkah preventif sedari awal di berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tahun 2022,

dana program Samisade kembali turun dan ini memerlukan perhatian ekstra.

"Inspektorat daerah harus dapat memastikan berbagai program pembangunan berjalan efektif dan efisien, sehingga Kabupaten Bogor bisa kembali mendapatkan WTP yang ketujuh," tutur Ade.

Ade Yasin berpesan, tingkatkan kompetensi di bidang Monitoring Center for Prevention (MCP), kepada camat dan jajaran kepala perangkat daerah, pemahaman MCP ini juga penting untuk mencegah sejak dini kecurian yang dapat menyebabkan kerugian negara.

Terutama camat saat ini sebagai tim teknis program Samisade. Dengan adanya MCP ini, diharapkan kita lebih baik mencegah daripada mengobati.

Inspektur Khusus Tjten Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Teguh Narutomo menjelaskan, ada 8 titik rawan tindak pidana korupsi yakni pertama, perencanaan dan penganggaran APBD seperti rawan mark up anggaran, keterlambatan pelaksanaan APBD, dan praktik suap, pemerasan, gratifikasi dalam pengesahan anggaran.

Kedua, pengadaan barang dan jasa seperti tidak independen, tidak transparan dan akuntabel, adanya kepentingan ter-



ADE YASIN Bupati Kabupaten Bogor

tentu dalam pelaksanaannya, dan persekongkolan pelangan.

"Ketiga, adalah perizinan seperti perizinan yang tidak transparan dan akuntabel, tidak memadai dan tidak representatif, dan delegasi kewenangan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan," kata Teguh.

Keempat, lanjut Teguh, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam istilahnya lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah, masih dinilai kurang, kompetensi APIP yang kurang memadai, dan peran APIP belum optimal dalam melakukan pendampingan kepada perangkat daerah.

"Kelima, manajemen ASN, standar pengelolaan ASN belum diimplementasikan, belum ada mekanisme penilaian kinerja dan pemberian reward and punish-

ment, serta praktik jual beli jabatan," terang Teguh.

Teguh menambahkan, keenam yakni optimalisasi pajak daerah, database pajak kurang optimal dan tidak up to date, pajak belum sesuai dengan potensi sebenarnya, tidak ada inovasi peningkatan pajak, dan tunggakan pajak yang tidak tertagih.

Ketujuh, manajemen aset daerah dan kedelapan, tata kelola keuangan desa.

Teguh menyebutkan, latar belakang MCP adalah tingginya kasus korupsi di tingkat Pemerintah Daerah, MCP bukan mencari orang-orang yang salah, melainkan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. ● gio